



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 29 Agustus 2019
Waktu	: Pukul 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan RKA K/L Tahun 2020
Ketua Rapat	: DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 27 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Menteri Sosial RI Beserta Jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.20 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si H. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, M.Si, dan Wakil Ketua Komisi VIII H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda **"Pembahasan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2020"**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI tentang Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp62.767.643.594.000,- (*enam puluh dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang dialokasikan untuk program:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial sebesar Rp469.129.710.000,- (*empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial sebesar Rp46.550.770.000,- (*empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - c. Pemberdayaan Sosial sebesar Rp391.757.849.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
 - d. Rehabilitasi Sosial sebesar Rp973.764.729.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp31.380.074.415.000,- (*tiga puluh satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).
 - f. Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp28.975.250.028.000,- (*dua puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
 - g. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Pengembangan dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp531.116.093.000,- (*lima ratus tiga puluh satu miliar seratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI memahami dilakukannya optimalisasi dan/atau realokasi anggaran program prioritas nasional untuk kebutuhan mendesak dan strategis oleh Kementerian Sosial untuk Tahun 2020 sebesar

Rp5.517.000.000.000-, (*lima triliun lima ratus tujuh belas miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp125.615.514.000,- (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*).
 - c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp44.223.746.000,- (*empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
 - d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp80.000.000.000,- (*delapan puluh miliar rupiah*).
 - e. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp2.422.160.740.000,- (*dua triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).
 - f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp2.843.000.000.000,- (*dua triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar rupiah*).
3. Berdasarkan penjelasan tertulis dan paparan yang disampaikan oleh Menteri Sosial RI mengenai Anggaran 2020 Kementerian Sosial, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI memberikan pandangan dan pendapat sebagai berikut:
- a. Dalam penyusunan program harus tetap memperhatikan indikator dan sasaran yang rinci sehingga diperoleh target yang jelas, terukur dan produktif.
 - b. Mempertajam kebijakan penyusunan program dan anggaran masing-masing dari satuan kerja agar lebih proporsional sehingga fokusnya menjadi jelas.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.55 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



DR. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum